

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Era masa kini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) semakin baik kualitas penyusunannya. LKPD merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban yang disusun secara terstruktur yang berisi mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Seiring perkembangannya paradigma pembangunan nasional juga mengalami perubahan yang sangat berdampak positif. Adapun perubahan ini diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (revisi UU No. 32 Tahun 2004).

Untuk memperoleh hasil laporan yang berkualitas maka pemerintah daerah harus menetapkan Standar akuntansi pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan landasan bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini dijelaskan dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah(dalam pengantar SAP). Pencapaian pengelolaan keuangan negara yang baik ditunjukkan dari kualitas penyajian laporan keuangan yang kemudian diberi opini oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Mildamayanti dkk, 2018). Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah harus

terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem formasi keuangan daerah, dan pemahaman atas akuntansi keuangan daerah (Nazrin, 2017). Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menjelaskan bahwa laporan keuangan yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan negara/daerah selama satu periode. Peraturan tersebut juga menjelaskan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas atau bernilai laporan keuangan harus memenuhi beberapa kriteria yang memadai seperti dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dapat dipahami dan memiliki relevansi (Rosmalita dan Nadirsyah, 2020). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya prinsip dan peraturan yang harus ada namun perlu orang yang berkompeten.

Sumber daya manusia adalah salah satu variabel yang paling berpengaruh terhadap pencapaian pelaporan keuangan secara handal. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan sebab baik tidaknya pelaporan keuangan tergantung dari sumberdaya manusianya. Patokan awal ini merupakan segala bentuk

perhatian pemerintah bahwa sumber daya yang handal adalah asset tersendiri bago daerah dalam mencapai proses kinerja daerah (Diana dkk, 2017).

Fenomena dan kenyataan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 yang dilansir dari Muria News menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam menyajikan laporan keuangan 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah di Pendapa Kudus, pada hari kamis 5 Desember 2019. Dengan raihan ini Kabupaten Kudus berhasil memperoleh opini WTP selama empat tahun secara berturut-turut.

Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan dengan diraihnya penghargaan WTP ini, para pegawai di lingkup Pemkab Kudus bisa termotifasi untuk meningkatkan kinerjanya. Hingga pada akhirnya, WTP akan jatuh kembali pada Pemkab Kudus. “Tentunya akan coba kami pertahankan di tahun-tahun yang akan datang,” Kata Plt Bupati Kudus HM Hartopo ketika dijumpai awak media. Beberapa kiat khusus seperti tetap menjaga transparansi, pembuatan laporan pertanggungjawaban yang jelas, serta bekerja dengan akuntabel pun akan dimaksimalkan. Karena itu, ia yakin tahun depan, penghargaan WTP akan kembali diraih Pemkab Kudus. “Tentunya semua harus bersinergi dalam hal ini,” Kata Plt Bupati Kudus HM Hartopo.

Sementara Kanwil Ditjen perbendaharaan provinsi Jawa Tengah Sulaiman Syah menyebut jika Kabupaten Kudus sebenarnya telah tujuh kali menerima

penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini. “Hanya yang dicatat mulai pada tahun keempat. Jika tidak, sudah tujuh kali berturut-turut,” Kata Sulaiman Syah. Kanwil Ditjen perbendaharaan provinsi Jawa Tengah Sulaiman Syah menyebutkan, untuk kriteria penerimaan penghargaan WTP sendiri, ada berbagai faktor. Hanya yang paling utama adalah pada empat pokok. Yang pertama adalah tentang sistem pengendalian internalnya. Kemudian poin kedua adalah apakah peraturan perundang-undangnya sudah sesuai dan sudah dijalankan dengan baik atau belum. Kemudian yang ketiga adalah tentang tidak adanya salah saji pada data yang disajikan.

Kualitas pelaporan keuangan dalam laporan keuangan daerah dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya faktor pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, faktor kualitas sumber daya manusia, faktor pengawasan keuangan daerah dan faktor pemanfaatan teknologi informasi. Faktor pertama yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sistem informasi yang mampu menangani dan mempercepat proses pengolahan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah (Yanti dkk, 2020). penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah telah dilakukan oleh Rosmalita dan Nadirsyah (2020) hasilnya menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti dkk (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan daerah.

Faktor kedua yaitu kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Mahayani dkk, 2017). penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan oleh Rosmalita dan Nadirsyah (2020) hasilnya menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Asnawi dan Pangayow (2019) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah.

Faktor ketiga yaitu pengawasan keuangan daerah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Yanti dkk, 2020). penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengawasan keuangan daerah telah dilakukan oleh Rosmalita dan Nadirsyah (2020) hasilnya menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti, dkk (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah.

Faktor keempat yaitu pemanfaatan teknologi informasi adalah Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer, perangkat lunak, database, jaringan, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi (Nadir dan Hasyim,

2017). penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan oleh Mildamayanti dkk (2018) hasilnya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana dkk (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi negatif terhadap laporan keuangan daerah.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Rosmalita dan Nadisyah, 2020. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia dan pengawasan keuangan, sedangkan penelitian ini menambah satu variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi karena variabel ini juga mempengaruhi seberapa berkualitas suatu laporan keuangan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang baik maka aparat keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Kedua dalam penelitian ini terdapat perbedaan obyek penelitian, pada penelitian sebelumnya lokasinya yaitu di pemerintah daerah kota Banda Aceh, sedangkan penelitian ini memiliki lokasi di pemerintah kabupaten Kudus Jawa Tengah.

Bedasarkan informasi yang dipaparkan di atas maka judul penelitian ini yaitu **"PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGAWASAN**

KEUANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH”

1.2 Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terarah dan menghindari hasil penafsiran penelitian yang tidak diinginkan atas hasil penelitian, maka penelitian ini lebih difokuskan pada pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan, kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi adalah raihan WTP yang didapatkan oleh kabupaten kodus ke enam kalinya secara berturut-turut yang membuat peneliti ingin mengetahui pengaruh dari penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan, kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
2. Apakah penerapan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
3. Apakah penerapan pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

4. Apakah penerapan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian yang telah di kemukakan di atas, maka didapatkan tujuan dari penelitian adalah untuk:

1. Menguji pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Menguji kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Menguji pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4. Menguji pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai faktor faktor motivasi yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi.

1.5.2 Kegunaan secara praktis

a. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi pada instansi pemerintah. Terutama kaitanya dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan, kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

b. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain untuk dikaji lebih dalam mengenai permasalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat terus bermanfaat dalam pengembangan ilmu akademik.